



Pemkot Kirim Tim ke Jakarta

UMBULHARJO, BERNAS

-- Tim pelimpahan pengelolaan Terminal Giwangan Yogyakarta bentukan Pemerintah Kota Yogyakarta akan mempertanyakan kepastian pengelolaan aset terminal ke Kementerian Perhubungan agar statusnya tidak lagi mengambang.

"Sudah ada tim yang diberangkatkan ke Jakarta untuk mempertanyakan hal ini. Tim terdiri dari Dinas Perhubungan dan Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta," kata Wirawan Hario Yudho, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Kamis (2/3).

Menurut dia, di dalam berita acara pelimpahan pengelolaan Terminal Giwangan yang ditandatangani pada Oktober 2016 disebutkan bahwa operasional terminal akan diambilalih oleh pusat mulai 1 Januari 2017, namun aset terminal masih dalam status pinjam pakai

dan akan dibahas kemudian. "Untuk operasional terminal sudah jelas diambilalih pusat, tetapi aset terminal ini yang masih harus dipastikan," kata Wirawan.

Ia kemudian mengusulkan agar aset terminal berupa tanah seluas 5,8 hektare termasuk bangunan yang ada tetap menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta. "Jika nanti pemerintah pusat mendapatkan lokasi lain untuk dibangun terminal, maka pemerintah bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk menghidupkan bagian selatan Kota Yogyakarta," kata Wirawan seraya menambahkan letak terminal sangat strategis.

Kepastian status mengenai aset terminal tersebut juga terkait dengan kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membayar sengketa Rp 56 miliar ke PT Perwita Karya sesuai keputusan Mahkamah Agung.

PT Perwita Karya adalah pengelola awal terminal namun kemudian Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan mengambil alih terminal. Pengambilalihan tersebut menimbulkan persoalan hukum dan pemerintah dinyatakan kalah sehingga harus membayar nilai aset terminal ke pengelola awal.

Selain itu, sejak operasional pengelolaan terminal dilimpahkan ke pusat, tidak ada lagi pungutan retribusi masuk terminal karena tidak ada aturan yang bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk memungut retribusi. Selama ini, pendapatan dari retribusi terminal mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar per tahun dan digunakan untuk biaya operasional. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini juga sudah tidak menganggarkan dana untuk operasional terminal. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005